KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT TATA NEGARA** **SUB DIREKTORAT PARTAI POLITIK**	Nomor SOP	AHU.UM.01.01-1158
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar NIP. 196909181994031001
	Judul SOP	**SOP Pendirian Badan Hukum Partai Politik**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 2 .Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik	1. Sarjana Hukum 2. Jabatan Analis Pertimbangan Hukum
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Persuratan	Komputer, Printer, Scanner Materi Hukum Peraturan Perundang-Undangan Alat Komunikasi Surat Permohonan dan Berkas Persyaratan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku dokumentasi Surat Keluar

SOP Permohonan Pendirian Badan Hukum Partai Politik

No.	Kegiatan	Pemangku Jabatan				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mempelajari, meneliti isi surat permohonan Pendirian Badan Hukum dan membuat disposisi kepada Kasubdit Partai Politik untuk menindaklanjuti permohonan	mulai				Surat permohonan, Lembar Disposisi	2 hari	Disposisi	Pengadministrasian di Tata Usaha
2	mempelajari disposisi Direktur, meneliti, menelaah dan memberikan disposisi kepada Kasi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik untuk menyiapkan konsep dasar SK Pendirian Badan Hukum Partai Politik apabila diterima atau Konsep Surat Jawaban apabila persyaratan kurang					Surat permohonan, Lembar Verifikasi, Lembar Disposisi	1 hari	Disposisi, Lembar Verifikasi	Surat permohonan dan Lembar Disposisi di dokumentasikan oleh Pejabat Pelaksana
3	mempelajari disposisi Kasubdit, menelaah dan memberikan arahan kepada Pelaksana untuk menganalisa, menyiapkan bahan perumusan untuk konsep dasar SK Pendirian Badan Hukum Partai Politik apabila diterima atau Konsep Surat Jawaban apabila persyaratan kurang					Surat permohonan, Lembar Verifikasi, Lembar Disposisi	1 hari	Disposisi, Lembar Verifikasi	
4	mempelajari disposisi Kasi, menganalisa, menyiapkan data dukung dan mengembangkan konsep dasar SK Pendirian Badan Hukum Partai Politik atau konsep dasar Surat Jawaban sesuai dengan UU no 2 Tahun 2011 dan Permenkumham No 34 Tahun 2017, mengetik Konsep SK dan Konsep Nota Dinas hingga Menteri atau Konsep Surat Jawaban dan konsep Nota Dinas hingga Dirjen kemudian menyampaikan kepada Kasi				T	Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	45 hari	Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	
5	memeriksa, memverifikasi, mengoreksi dan memberi paraf konsep SK Pendirian Badan Hukum Partai Politik atau konsep surat jawaban dan menandatangani nota dinas serta menyampaikan kepada Kasubdit. Jika tidak menyetujui dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki		Y			Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	2 hari	Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	
6	memeriksa, memverifikasi, mengoreksi dan memberi paraf konsep SK Pendirian Badan Hukum Partai Politik atau konsep surat jawaban dan konsep nota dinas serta menyampaikan kepada Direktur. Jika tidak menyetujui dikembalikan kepada Kasi Pendaftaran Badan Hukum untuk diperbaiki	Y		T		Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep SK Menteri dan Konsep Nota Dinas	2 hari	Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	Proses Pengiriman ke TU oleh Pejabat Pelaksana
7	mengetahui, menyetujui dan memberi paraf konsep SK Pendirian Badan Hukum Partai Politik atau konsep surat jawaban dan menandatangani nota dinas serta menyampaikan kepada Dirjen.	selesai				Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	2 hari	Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	Konsep Dikirim ke TU